

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN DAN
KESEHATAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

ROSMIA ATDJAR

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mulawarman

ABSTRACT

Rosmia Atdjar, 2018. Effect of Government Spending for Education and Health to Human Development Index in East Kalimantan province , the guidance of Aji Sofyan Effendi and Juliansyah Roy

The purpose of this study was to determine the Effect of Government Spending for Education and Health to Human Development Index in East Kalimantan province. The data used in this research is secondary data with a period of ten years.

This study analyzed using multiple linear regression analysis. The result of this analyzed is government spending on education was not significant to the human development index. And government spending on health was not significant to the human development index in East Kalimantan province.

Keywords: Government Spending on Education, Government Spending on Health, Human Development Index

ABSTRAK

Rosmia Atdjar, 2018. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Kalimantan Timur, bimbingan Aji Sofyan Effendi dan Juliansyah Roy.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Kalimantan Timur. data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam kurun waktu sepuluh tahun.

Penelitian ini dianalisa dengan menggunakan alat analisis regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan pengeluaran pemerintah dibidang kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Timur.

Kata Kunci : Pengeluaran Pemerintah bidang Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah bidang Kesehatan, Indeks Pembangunan Manusia.

Latar Belakang

Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator bagi kemajuan suatu Negara. Suatu Negara dikatakan maju bukan hanya dihitung berdasarkan dari pendapatan domestik bruto saja tetapi juga mencakup aspek harapan hidup serta pendidikan masyarakatnya. IPM merupakan salah satu cara untuk mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat yang tercermin dari nilai *purchasing power parity*.

Ada dua faktor yang perlu diperhatikan oleh pemerintah sehubungan dengan upaya memperluas kesempatan penduduknya untuk mencapai hidup layak yaitu pendidikan dan kesehatan. Dalam hal ini bias terwujud melalui alokasi pengeluaran pemerintah di sector pendidikan dan kesehatan. Dengan meningkatnya alokasi pengeluaran pemerintah di sector public tersebut maka akan meningkatkan pula produktivitas penduduk.

Peningkatan produktivitas ini, mampu meningkatkan pembangunan manusia yang selanjutnya dengan sendirinya berdampak pada penurunan angka kemiskinan. Posisi manusia selalu menjadi temasentral dalam setiap program pencapaian pembangunan. Pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator bagi kemajuan suatu negara. Suatu negara dikatakan maju bukan saja dihitung dari pendapatan domestik bruto saja tetapi juga mencakup aspek harapan hidup serta pendidikan masyarakatnya. Dengan peningkatan kemampuan, kreatifitas dan produktivitas manusia akan meningkat sehingga mereka menjadi agen pertumbuhan yang efektif. Upaya membuat pengukuran pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan suatu wilayah harus dapat memberikan gambaran tentang dampak dari pembangunan manusia bagi penduduk sekaligus dapat memberikan gambaran tentang persentase terhadap pencapaian secara ideal.

Pembangunan manusia melalui sector pendidikan turut dipertimbangkan karena melalui pendidikan manusia mengalami sebuah proses. Proses tersebut dilalui oleh manusia untuk meningkatkan ilmu, pengetahuan, kemampuan atau keahlian, meningkatkan kreatifitas ataupun inovasi yang keseluruhannya dapat meningkatkan harkat dan martabat setiap individu. Pendidikan terlihat sebagai investasi sumber daya saat ini untuk mendapatkan return di masa depan. Apabila kualitas sumber daya manusia tersebut rendah yang tercermin adalah tingkat pendidikan dan kesehatan yang rendah pula yang tentunya berpengaruh juga pada pembangunan manusia. Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal didasarkan pada pertimbangan bahwa daerah lah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat

daerahnya, sehingga pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memacu peningkatan kesejahteraan di daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi.

IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yang dilihat dari kualitas fisik dan non fisik penduduk. Adapun tiga indikator tersebut, yaitu: 1) Indikator kesehatan, 2) Tingkat pendidikan, dan 3) Indikator ekonomi. Pendidikan dan Kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar di suatu wilayah.

Pemerintah provinsi Kalimantan Timur setiap tahunnya selalu menyediakan anggaran yang cukup besar untuk bidang pendidikan dan kesehatan. Hal ini menandakan bahwa pemerintah serius dalam memperbaiki kualitas sumber daya manusia yang ada di Kota Provinsi Kalimantan Timur, salah satu bentuk pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan yaitu melalui dana bantuan sekolah atau beasiswa yang disediakan pemerintah setiap tahunnya. Pembangunan manusia melalui sektor pendidikan turut dipertimbangkan karena melalui pendidikan manusia mengalami sebuah proses. Proses tersebut dilalui oleh manusia untuk meningkatkan ilmu, pengetahuan, kemampuan atau keahlian, meningkatkan kreatifitas ataupun inovasi yang keseluruhannya dapat meningkatkan harkat dan martabat setiap individu.

Pendidikan terlihat sebagai investasi sumber daya saat ini untuk mendapatkan return dimasa depan. Apabila kualitas sumber daya manusia tersebut rendah yang tercermin adalah tingkat pendidikan dan kesehatan yang rendah pula yang tentunya akan berpengaruh juga pada pembangunan manusia. Pelaksanaan kebijakan ekonomi daerah dan desentralisasi fiskal didasarkan pada pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat daerahnya, sehingga pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memacu peningkatan kesejahteraan di daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Sarana pendidikan di Kota Provinsi Kalimantan Timur tersedia mulai dari pendidikan Taman Kanan-Kanak (TK) sampai ke Perguruan Tinggi. Sektor pendidikan mengalami perkembangan setiap tahunnya, diindikasikan dengan penambahan jumlah murid yang diiringi dengan penambahan jumlah sekolah, jumlah guru dan jumlah kelas. Penambahan jumlah sekolah, guru dan kelas merupakan upaya pertama dari pemerintah dalam rangka pemerataan kesempatan mengenyam pendidikan bagi warga negara. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945 yang dijabarkan pada UU Pendidikan Nasional. Program wajib belajar pun disesuaikan dari 9 tahun menjadi 12 tahun.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Pembangunan Manusia

Pembangunan sebenarnya meliputi dua unsur pokok. *Pertama*, materi yang dihasilkan dan dibagi. *Kedua*, masalah manusia yang menjadi manusia pembangunan. Para ahli ekonomi memang berbicara tentang SDM atau sumber daya manusia. Tetapi pembicaraan tentang manusia disini lebih menekankan aspek keterampilan. Dengan demikian, manusia dianggap sebagai masalah teknis untuk peningkatan produksi saja. Dengan demikian, masalah manusia dilihat sebagai masalah teknis untuk peningkatan keterampilan, melalui bermacam sistem pendidikan (Arief Budiman, 2000: 14).

Pada titik ini, berbicara tentang faktor-faktor non-material, seperti adanya rasa aman, rasa bebas dari ketakutan, dan sebagainya. Hanya dengan diciptakannya suasana ini, kondisi yang merangsang kreativitas (yang pada gilirannya akan melahirkan manusia-manusia pembangunan yang punya inisiatif dan dapat memecahkan bermacam persoalan) dapat diselenggarakan. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya berurusan dengan produksi dan distribusi barang-barang material. Selain itu pembangunan juga harus menciptakan kondisi-kondisi yang membuat manusia bisa mengembangkan kreativitasnya. Bagaimanapun juga, pembangunan pada akhirnya harus ditujukan pada pembangunan manusia. Manusia yang dibangun adalah manusia yang kreatif. Untuk bisa kreatif, manusia tersebut harus merasa bahagia, merasa aman dan bebas dari rasa takut. Hanya manusia seperti inilah yang bisa menyelenggarakan pembangunan dan memecahkan masalah yang dijumpainya (Arief Budiman, 2000: 14).

Pengertian prinsip bertumpu pada pembangunan manusia adalah masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia daripada pembangunan fisik semata (PTO PNPM Mandiri Perdesaan, 2010).

Untuk menjelaskan fungsi ilmu Sosiologi, ada gunanya jika melihat ke proses pengaturan peran-serta pemanfaat dalam pembangunan pedesaan. Pernyataan “mengutamakan manusia” dalam proyek-proyek pemabangunan berarti member manusia lebih banyak peluang untuk berperan secara efektif dalam kegiatan pembangunan. Hal ini berarti memperkuat manusia untuk mengarahkan kapasitas

mereka sendiri, menjadi actor sosial ketimbang subyek yang pasif, mengelola sumberdaya, membuat keputusan dan mengawasi kegiatan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Hasil dari pendekatan atas-bawah (*top-down*) yang paternalistik cukup terkenal. Kita sekarang tiba-tiba mendengar mode-mode pernyataan yang mendukung pendekatan peran-serta (*participatory approaches*) dari politikus, perencana ahli ekonomi, dan teknokrat.

Para ahli ilmu sosial adalah di antara yang pertama menjelaskan perlunya partisipasi. Partisipasi dalam program pembangunan pedesaan lebih merupakan slogan daripada realita. Pernyataan yang dilontarkan secara tajam oleh Gelias Castillo – “bagaimana peran-serta menjadi peran-serta pembangunan” (*how participatory is participatory development?*) – sepenuhnya dibenarkan dan harus dinyatakan pada setiap program pembangunan. Apa yang sesungguhnya terjadi apabila manusia *tidak* diutamakan secara meyakinkan telah ditunjukkan oleh analisis dari banyak program pembangunan yang selesai namun gagal (Michael M. Cernea, 1988: 13).

Condrad Phillip Kottak dalam Michael M. Cernea (1988), menyatakan bahwa mengutamakan manusia dalam campur tangan pembangunan berarti memenuhi kebutuhan bagi perubahan yang mereka rasakan; mengidentifikasi sasaran dan strategi bagi perubahan yang sesuai dengan budaya; membangun yang tepat-guna secara budaya, dapat dilaksanakan, dan rancangan yang efisien bagi inovasi; lebih bertujuan memanfaatkan ketimbang menentang kelompok dan organisasi yang ada; memantau dan mengevaluasi secara informal peserta selama pelaksanaan; dan mengumpulkan informasi terinci sebelum dan sesudah pelaksanaan sehingga dampak sosioekonomi dapat dinilai secara akurat. Keahlian sosial dapat membantu melokasikan dan merumuskan proyek-proyek yang diprakarsai oleh penduduk setempat dalam menjawab masalah-masalah konkret yang mereka rasakan dan perubahan yang ingin mereka lakukan sendiri. Para ahli Sosiologi juga dapat membantu melokasikan “kantong-kantong kemiskinan” yang merupakan arah program pembangunan (Michael M. Cernea, 1988: 452)..

METODE PENELITIAN

3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Batasan dari variabel yang dibahas dalam penelitian ini dikemukakan secara teoritis dan selanjutnya untuk mempermudah dan memperjelas pengertian batasan tersebut, maka diperlukan penjabaran dalam bentuk operasional, agar pembahasan variabel yang digunakan dapat terfokus dalam permasalahan dan hipotesis yang ada, maka diberikan batasan operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Indeks Pembangunan Manusia (Y)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam penelitian ini adalah perkembangan Indeks Pembangunan Manusia yang diukur berdasarkan tiga indikator yaitu Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf dan *Purchasing Power Parity* di Kalimantan Timur selama periode tahun 2006 sampai 2015, satuan yg digunakan adalah Persen.

2. Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan (X_1)

Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan adalah belanja pemerintah di bidang pendidikan di provinsi Kalimantan Timur periode tahun 2006 hingga 2015, satuan yang digunakan adalah Rupiah.

3. Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan (X_2)

Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan adalah belanja pemerintah di bidang kesehatan di provinsi Kalimantan Timur periode tahun 2006 hingga 2015, satuan yang digunakan adalah Rupiah.

3.2 Uji Kelayakan Model

Pengujian model dimaksud untuk memperoleh kepastian tentang konsistensi model estimasi yang dibentuk berdasarkan teori ekonomi yang melandasinya. Untuk melihat spesifikasi model dilakukan uji linieritas serta untuk melihat distribusi data dalam model regresi, dilakukan uji normalitas. Pengujian penyimpangan asumsi klasik dimaksud untuk menjamin bahwa model yang diestimasi bebas dari gangguan autokorelasi, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Pengujian terhadap gangguan diatas adalah sebagai berikut:

3.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak (Hasan,

2001:292). Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal. Uji normalitas dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik dan dengan melihat histogram dari residualnya. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya maka data menunjukkan pola distribusi normal, sehingga model regresi memenuhi asumsi normalitas. Selain dari grafik dan histogram yang tesaji, normalitas dapat dideteksi dengan uji Kolmogorov-Smirnov.

Data berdistribusi normal, jika nilai sig (signifikansi) > 0,05

Data berdistribusi tidak normal, jika nilai sig (signifikansi) < 0,05

3.2.2 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas berarti antara variable bebas yang satu dengan variable bebas lain dalam model regresi saling berkorelasi linier. Akibat adanya multikolinearitas adalah pengaruh masing-masing variabel bebas tidak dapat dideteksi atau sulit untuk dibedakan (Hasan, 2001:292).

Adanya multikolinieritas dalam regresi dapat diketahui dengan menganalisis nilai *varian inflation factor* (VIF) lebih besar dari 10 maka variabel bebas tersebut memiliki persoalan multikolinieritas, dan juga dapat menggunakan TOL (*Tolerance*) untuk mendeteksi apakah suatu model terkena multikolinearitas atau tidak, jika TOL (*Tolerance*) lebih besar dari 0,10, maka variabel bebas

3.2.3 Perhitungan Koefisien Determinasi (R^2)

Perhitungan koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh antara variabel tidak bebas dengan variabel bebas. Semakin besar nilai R^2 , maka semakin tepat model regresi yang dipakai sebagai alat analisis, karena total variasi dapat menjelaskan variabel tidak bebas. Untuk menghitung digunakan rumus sebagai berikut: (Hasan: 2004: 63)

$$R^2 = (KK)^2 \times 100\%$$

Dimana:

KK = Koefisien Korelasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

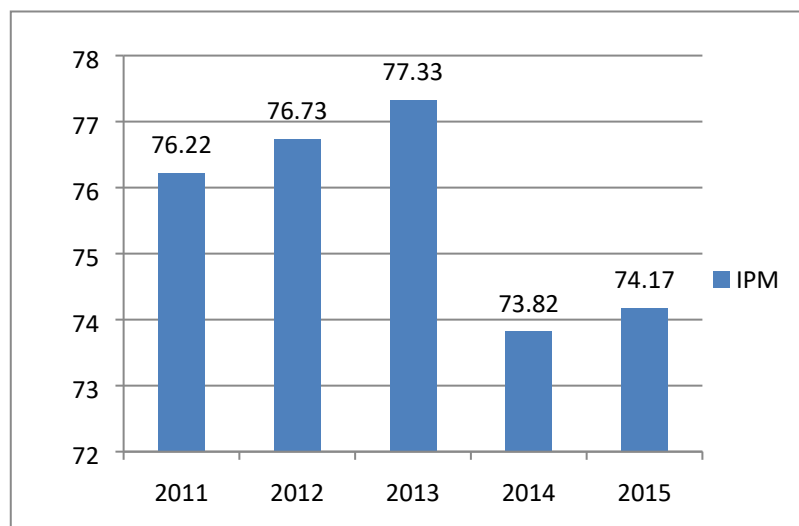
4.1.1 Gambaran Umum Kalimantan Timur

Penduduk Kalimantan Timur dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup berarti. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Jumlah penduduk pada tahun 2012 sebesar 3.199.696 jiwa, meningkat menjadi 3.275.844 jiwa pada tahun 2013, dan mengalami peningkatan kembali di tahun 2014 menjadi 3.351.432 jiwa. Hal ini berarti bahwa dalam periode tersebut penduduk Kalimantan Timur hampir 100 ribu jiwa setiap tahunnya. Perkembangan penduduk Kalimantan Timur yang dirinci menurut Kecamatan dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

4.1.2 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Timur

Pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2015 terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya nilai IPM Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2015, IPM Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai 74,17. Angka ini meningkat sebesar 0,35 poin dibandingkan dengan IPM Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2014 yang sebesar 73,82. Adapun perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada Gambar 4.2 sebagai berikut:

Gambar 4.2
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2015



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2016

4.1.3 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Pegeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen kebijaksanaan fiskal yang terutama bertujuan untuk mencapai kestabilan ekonomi yang baik dengan tetap mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi. Peran pemerintah dalam meningkatkan indeks Pembangunan Manusia dapat diwujudkan melalui realisasi belanja Negara dalam pelayanan public untuk melindungi dan meningkatkan kualitas standar kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas social dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jamian social dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar arga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal.

Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan dalam pengeluaran pemerintah dari tahun ketahun. Hal ini dapat dilihat pada grafik sebagai berikut

Rp.1.154.193.260.000,00. Sedangkan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp.636.804.332.551,00. Dari tahun 2011 pengeluaran pemerintah bidang kesehatan sebesar Rp.636.804.332.551,00 terus meningkat pada tahun 2012

4.2. Analisis

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Provinsi Kalimantan Timur mengenai IPM, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan , Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan baik belanja secara langsung maupun secara tidak langsung di Kota Provinsi Kalimantan Timur Periode 2010 - 2015, maka akan dilakukan analisis terhadap data-data tersebut. Dalam penelitian ini terdapat variabel independen yaitu pengeluaran Pemerintah bidang pendidikan (X_1), pengeluaran Pemerintah bidang kesehatan (X_2) sedangkan untuk variabel dependen yaitu IPM (Y). Maka untuk mengetahui pengaruh hubungan antara variabel-variabel tersebut, selanjutnya dilakukan analisis di pembahasan yang

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan data-data dari hasil penelitian, analisa data dan model yang digunakan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Belanja bidang Pendidikan (X_1) tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM (Y) di Provinsi Kalimantan Timur, karena di bidang pendidikan pemerintah mengalokasikan anggaran diantaranya untuk peningkatan mutu program pendidikan, tenaga kependidikan, insentif guru, jenjang SMA/SMK, beasiswa bagi pelajar maupun mahasiswa. Dana tersebut juga untuk perbaikan fisik disekolah. Sedangkan Pengeluaran Pemerintah di sektor pendidikan lebih terfokus pada pembangunan infrastruktur. Sehingga hal ini kurang memberikan pengaruh secara langsung terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
2. Belanja bidang Kesehatan (X_2) tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM (Y) di Provinsi Kalimantan Timur. Dari segi kesehatan, pemerintah provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini telah mengupayakan semaksimal mungkin untuk pengeluaran anggaran bidang kesehatan, namun faktanya di lapangan masih banyak masyarakat yang kurang mampu belum bisa menikmati pelayanan dari rumah sakit secara maksimal.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, adapun saran yang dikemukakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat meningkatkan pengeluaran dibidang pendidikan dan kesehatan agar tujuan pembangunan dibidang sumber daya manusia dapat terus meningkatkan anggaran yang ada serta tidak melakukan pemborosan yang dapat merugikan daerah.
2. Hendaknya pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diharapkan mampu mengalokasikan pengeluaran pemerintah secara proposional baik belanja di bidang pendidikan maupun belanja di bidang kesehatan agar dapat memberikan kontribusi yang lebih maksimal lagi dan sesuai dengan tujuan target yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, Badan Pusat Statistik. 2016. Indikator Kesejahteraan Manusia Provinsi Kalimantan Timur tahun 2006-2015. Badan Pusat Statistik, Provinsi Kalimantan Timur
- , Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- , Undang-undang No 23 Tahun 1992 dan Undang-Undang 1945 Pasal 28H ayat 1 tentang Kesehatan
- Algifari, Badrudin Rudy. 2013. *Matematika Bisnis*. BPFE. Yogyakarta
- Arfida, BR. 2002. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Arsyad, Lincolyn. 2004. *Ekonomi Pembangunan*, Cetakan Kedua. Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ekonomi YKPN. Yogyakarta.
- Astri, Meylina. 2013. *Pengeluaran Pemerintah daerah pada sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia*. Fakultas Ekonomi UNJ. Jakarta.
- Boediono. 1992. *A Comprehensive System Financing Education*, Vol IV. EPP-USAID. Yogyakarta.
- , 1999, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. BPFE. Yogyakarta.
- Danim, S. 2002. *Inovasi Pendidikan*. CV Pustaka Setia. Bandung.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2016. (www.djpk.kemenku.go.id). Diakses Tanggal 25 Agustus 2016.
- Eka Agustina, Eny Rochaida, dan Yana Ulfah. 2016. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Serta Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Manajemen*, Volume 12, No. 2, Tahun 2016 (<http://journal.feb.unmul.ac.id>) Diakses Tanggal 03 November 2017
- Hasan, Iqbal. 2001. *Pokok-pokok materi statistik 2*. Bumi Aksara. Jakarta
- Juanita. 2002. *Kesehatan dan Pembangunan Nasional*. Tesis magister AKK FKM USU. Medan.
- Kaho, Josef Riwu. 1997. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. PT Grafindo Persada. Jakarta.
- Kumalasari, Merna. 2010. Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Angka Harapan Hidup, Angka Huruf Melek, Rata-rata Lama Sekolah, Pengeluaran Perkapita dan Jumlah penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah. Semarang.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Erlangga. Yogyakarta.
- , 2013. *Indikator Ekonomi*. STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mangkoesebroto, Guritno. 2001. *Ekonomi Publik edisi 3*. BPFE. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi, Yogyakarta.
- Pamudji, S. 1981. *Teori Sistem dan Penerapannya dalam Manajemen*. Ichtiar Baru Van Hoeve. Jakarta.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sukirno, Sadono. 1996. *Pengantar Teori Makroekonomi*. Rajawali Pers. Jakarta.

Suparmoko. 2000. *Keuangan Negara*. BPFE. Yogyakarta.

Tjandra, W. Riawan. 2006. *Hukum Keuangan Negara*. PT Grasindo. Jakarta.

Todaro, Michael P. 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, edisi Kedelapan*. Erlangga. Jakarta.

Wajong, J. 1975. *Administrasi Keuangan Daerah*. Ichtiar Baru Van Hoeve. Jakarta.